

## Provinsi Banten Pastikan Pasokan Bahan Pangan Stabil

SERANG (IM) - Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan beberapa langkah upaya untuk mempersiapkan dan memastikan ketersediaan bahan pangan saat bulan Ramadhan.

Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan di masyarakat.

Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, M Yusuf usai memimpin High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (21/3).

"Tadi kita membahas beberapa hal. Di antaranya persiapan menghadapi bulan puasa dan lebaran. Semua stakeholder yang hadir di sini optimis bahwa di kita (Provinsi Banten) itu stabil pasokan beserta pengendaliannya," ungkapnya.

Selanjutnya, M Yusuf mengatakan pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan di sejumlah pasar.

"Semua komoditi, terutama beras, cabai dan se-

bagainya. Insya Allah dapat stabil di bulan puasa," katanya.

Dikatakannya, selain membahas terkait ketersediaan bahan pangan, pada kesempatan tersebut juga membahas beberapa hal, diantaranya terkait ketersediaan dan distribusi BBM, transportasi, dan lainnya.

"Insya Allah mudah-mudahan semua dapat terkendali dengan baik. Jadi tidak perlu ada yang dirisaukan. Walaupun saat ini ada harga yang naik itu mekanisme pasar, bukan karena tidak adanya barang," imbuhnya.

"Pergerakan harga itu kan mekanisme pasar. Ya itu tidak jauh dan terkendali sesuai dengan koridor batasan yang ada," tandasnya.

Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Korem 064 Maulana Yusuf, Kepolisian Daerah Banten, BPS Provinsi Banten, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Provinsi Banten serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM). ● pra

## Gagalkan Peredaran 6,5 Kg Ganja, Babin-Babinsa Dapat Hadiah Motor

BOGOR (IM) - Babinsa Koramil 0621-01 Cibinong Kodim 0621/Bogor, Serka Sunardi bersama Bhabinkamtibmas Kelurahan Sukahati, Bripta S Dewa mendapatkan penghargaan masing-masing satu unit motor. Hadiah tersebut diberikan karena aksi heroiknya yang berhasil menggagalkan peredaran 6,5 kg di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto bersama Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin menyerahkan langsung hadiah tersebut. Penyerahan dilakukan di Mako Polres Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor.

"Keberhasilan TNI adalah keberhasilan Polri, keberhasilan Polri adalah keberhasilan TNI. Jadi sinergisitas yang terbangun antara TNI-Polri di Kabupaten Bogor ini menunjukkan sinergisitas yang terbangun cukup baik dalam memerangi ancaman bahaya narkoba," kata Rudy Susmanto melalui keterangannya, seperti dilihat, Rabu (22/3).

Rudy berharap hadiah tersebut bisa meningkatkan kinerja petugas TNI-Polri yang lainnya. Terutama dalam memerangi narkoba di wilayah Kabupaten Bogor.

Terpisah, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota yang berhasil menggagalkan peredaran ganja tersebut. Sebab, hal itu dilakukan di luar tugas pokoknya.

"Kami memberikan apresiasi kepada anggota yang berprestasi melebihi tugas pokoknya, yang mana hal tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan karier terhadap personel Polri yang berprestasi yang lebih dari tugas pokoknya," ujar Iman.

Iman juga berharap hadiah tersebut bisa memicu anggotanya di Polres Bogor agar bisa bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan ini juga dapat menjadi motivasi bagi kami personel jajaran Polres Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat," terangnya. Diketahui, Serka Sunardi menangkap bandar narkoba berinisial MN (25) pada Kamis (16/3). Dia bahkan sampai terseret 10 meter saat menangkap MN.

Dia mulanya menerima informasi dari warga bahwa ada transaksi mencurigakan di salah satu warung ubi. Kemudian dia bergerak cepat menangkap MN. ● jay

## Ramadan, THM dan Panti Pijat di Kab. Tangerang Wajib Tutup

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Tangerang nomor 300.1/1304-Satpol PP tentang penutupan sementara tempat hiburan malam (THM) dan sejenisnya, serta pengaturan jam operasional rumah makan dan sejenisnya saat bulan Ramadan 1444 hijriah ini.

Dalam surat edaran Bupati Tangerang tersebut, Pemkab Tangerang perlu melakukan pengaturan kepada pelaku usaha tempat hiburan diskotik, klub malam, bar, karaoke, spa atau panti pijat, dan sejenisnya supaya menutup sementara dan tidak melakukan aktivitas operasional pada bulan suci Ramadan 1444 H.

Pelaku usaha restoran maupun rumah makan, kafe, dan sejenisnya agar mengalihkan jam operasional usahanya dimulai Pukul 15.00 WIB sampai dengan Pukul 04.00 WIB, memasang tirai atau sejenisnya bagi menyediakan makan di tempat dan tidak diperkenankan menggunakan musik langsung (live music) atau bentuk lain yang dapat mengganggu ibadah di bulan Ramadan 1444 hijriah tahun ini.

Sekretaris MUI Kabupaten Tangerang, KH Nur Alam Jaclani mengatakan,

jelang memasuki bulan suci Ramadan 1444 hijriah, MUI Kabupaten Tangerang juga telah membuat imbauan bersama kepada masyarakat Kabupaten Tangerang.

Ada sembilan poin imbauan yang harus masyarakat lakukan. Hal tersebut supaya masyarakat bisa menjalankan ibadah puasanya secara khusus dan baik.

"Sembilan imbauan bersama tersebut antara lain yaitu, sambat bulan ramadan 1444 hijriah ini dengan rasa syukur dan hati yang lapang," ujarnya, Rabu (22/3).

Selain itu, lanjut Nur Alam juga mengungkapkan, bahwa masyarakat harus melaksanakan puasa dengan khusyuk dan tawadhu, hindari diri dari hal yang bisa membatalkan puasa, cipratan lingkungan yang tertib dan aman, hormati bulan puasa dengan tidak makan dan minum di muka umum, atur penggunaan speaker di masjid dan rumah ibadah lainnya agar efisien.

"Selain itu, tunaikan zakat dan shodaqoh, mengalihkan jam operasional bagi rumah makan maupun restoran agar membuka pelayanannya pada jam 16.00 hingga waktu sahur dan kumandangkan takbir dengan khusus," tutupnya. ● pp

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



### KEPADATAN PASAR TRADISIONAL JELANG RAMADAN

Sejumlah warga berbelanja kebutuhan di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/3). Menjelang Ramadan 1444 H warga mulai memadati pasar di daerah tersebut untuk berbelanja kebutuhan selama bulan puasa.

### TINJAU BENCANA EMPANG

## DPRD Kota Bogor Minta Relokasi Segera Dilakukan

Terkait titik lokasi yang akan dijadikan relokasi warga korban bencana dan wilayah rawan bencana, sudah ada beberapa opsi berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor. Hanya saja, opsi-opsi yang ada perlu diperkuat dan dipastikan lagi lebih lanjut agar bisa segera ditindaklanjuti.

BOGOR (IM) - Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto bersama Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin dan anggota DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni

serta Mardiyanto meninjau lokasi bencana longsor yang terjadi di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (16/3). Kedatangan mereka guna memastikan

penanganan bencana berjalan maksimal, sekaligus memberikan dukungan moral kepada relawan dan petugas yang berusaha menemukan empat orang korban yang masih terdampar longsor.

Didampingi oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Theofilo Patricinio Freitas, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor memantau proses evakuasi oleh tim gabungan dan menyiapkan posko pengungsian.

Di samping itu, pimpinan dan anggota DPRD Kota

Bogor juga mengunjungi keluarga dari korban untuk memberikan kekuatan dan menyampaikan rasa belasungkawa. Mereka pun menyampaikan bantuan operasional untuk pos dapur umum relawan dan bantuan kemanusiaan untuk posko pengungsian.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya dari DPRD Kota Bogor kepada keluarga korban yang kehilangan sanak keluarganya atas tragedi bencana longsor yang terjadi.

Ia berharap, dalam waktu dekat ini para korban bisa ditemukan, melihat situasi dimana alat berat sudah mulai dikerahkan oleh tim evakuasi gabungan.

Lebih lanjut, JM menilai kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Empang sebagai peringatan kepada Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor selaku pemangku kebijakan untuk bisa mengambil langkah pencegahan lebih dini dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana sesuai dengan kontur kemiringan.

"Data ini yang seharusnya memang dimiliki oleh pemerintah, bahwa terdapat beberapa titik yang dirasa perlu mendapatkan treatment lebih lanjut, perlu mendapat konservasi yang lebih kuat, maksimal, itu yang harus lebih dini kita perkuat," tegas JM.

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan kejadian longsor di Kelurahan Empang menguatkan kesimpulan bahwa di Kota Bogor terdapat wilayah yang merupakan zona berbahaya dan tidak layak untuk ditinggali. Ia pun menyampaikan beberapa langkah penting untuk dilakukan Pemerintah.

"Pertama, operasi tanggap darurat. Kami melihat langkah yang dilakukan oleh tim gabungan sudah benar. Apresiasi dan terima kasih atas koordinasi dan gerak cepat BPBD, Dinas Sosial, Damkar, TNI, Kepolisian, dan relawan

untuk mengevakuasi warga dan melakukan langkah pencarian korban yang belum ditemukan," jelas Atang.

Kedua, memastikan korban yang selamat mendapatkan penanganan dan perawatan yang maksimal. "Berikutnya adalah memastikan penanganan korban selamat dengan baik. Penanganan medis, posko pengungsian, dan tempat tinggal sementara selama beberapa bulan ke depan," imbuhnya.

Terakhir, Ketua DPRD meminta agar relokasi yang sudah direncanakan oleh Pemkot pasca pemetaan lokasi rawan bencana segera dijalankan. "Bencana ini semakin menguatkan kesimpulan kita bahwa Kota Bogor memiliki wilayah sangat rawan untuk ditinggali warga. Pemetaan wilayah yang sudah kita minta sebelumnya harus segera ditindaklanjuti relokasinya. Relokasi yang belum berjalan secara cepat ini perlu menjadi perhatian bersama oleh kami di DPRD dan Pemkot agar segera memastikan zona hitam yang sudah dipetakan bisa segera dipindahkan," ujar Atang.

Terkait dengan titik lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi relokasi warga korban bencana dan wilayah rawan bencana, Atang mengungkapkan sudah ada beberapa opsi berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor. Hanya saja, opsi-opsi yang ada perlu diperkuat dan dipastikan lagi lebih lanjut agar bisa segera ditindaklanjuti.

"Banyak aset lahan milik Pemerintah yang bisa digunakan. Sudah ada beberapa alternatif yang disiapkan. Ini perlu segera dieksekusi. Kalau pun katakanlah pemerintah mengalami kesulitan, lahan di Katulampa bisa digunakan untuk relokasi warga daripada dipake untuk pusat kota pemerintahan baru. Itupun kalau gak ada lahan sama sekali. Tapi kan sebenarnya masih ada yang lain," pungkasnya. ● jay

## Anne Targetkan Purwakarta Nihil Stunting pada 2024

PURWAKARTA (IM) - Penanganan kasus stunting menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia pada 2021, prevalensi stunting di Purwakarta telah menunjukkan penurunan signifikan, dari 23,42% tahun 2019 menjadi 20,6% pada dua tahun lalu.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengatakan pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak panjang yang merugikan, seperti terhambatnya tumbuh kembang anak.

Anne menjelaskan bahwa penanganan stunting menjadi salah satu fokus utamanya sejak awal menjabat.

Dia menargetkan pada 2024 tidak ada lagi kasus stunting di Purwakarta.

"Target kami pada tahun 2024 tidak ada lagi kasus stunting di Purwakarta. Pencegahan terus kami lakukan melibatkan semua pihak. Bagi kami, anak-anak memiliki hak yang sama untuk menikmati masa kecilnya," kata Anne baru-baru ini.

"Kita terus keliling ke setiap Kecamatan, untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena stunting, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang bahaya dan dampak stunting. Kemarin di Kecamatan Pasawahan, hari ini di Kecamatan Purwakarta, besok di tempat lain, dan ini komitmen kami memerangi stunting sejak dini," lanjut Anne.

Kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan stunting menurut Anne, yakni melalui intervensi. Dimulai dari intervensi pada tahapan pranikah, ibu hamil, hingga ke tumbuh kembang fisik dan psikis anak. ● pra




SEGENAP JAJARAN DIREKSI BESERTA STAF  
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR

Marhaban Ya  
**Ramadhan**

**Selamat Menjalankan Ibadah Puasa**  
1444 H / 2023

*Semoga ibadah puasa kita mendapat ridha dari Allah SWT.*



**ABDUL SOMAD**  
Direktur Umum



**YULIUS ANWAR**  
Direktur Utama



**TEDI KURNIAWAN**  
Direktur Operasional

## Selama Ramadan, Warga Tangsel Dilarang Sahur dan Bukber OTR

TANGSEL (IM) - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur kegiatan usaha serta imbauan amaliyah selama Ramadan.

Salah satu poinnya adalah melarang kegiatan sahur dan buka bersama On the Road (OTR).

Edaran bernomor 100.3.4.3/1144/KES-RA/2023 itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangsel. Dalam surat itu terdapat 6 poin, termasuk membahas soal sanksi.

"Dilarang mengadakan acara buka puasa on the road atau sahur on the road," bunyi poin 4 huruf c dalam edaran tersebut, dikutip Rabu (22/3).

Nantinya, pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan aparat berdasarkan kewenangan

masing-masing. Sedangkan sanksinya akan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Tangsel.

"Setiap orang dan/badan yang melakukan pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kewenangan instansi Pemerintah/Pemerintah Kota Tangerang Selatan," bunyi poin 6 penutup dalam edaran itu.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ikhsan mengatakan, Surat Edaran tersebut juga mengatur tempat usaha seperti restoran dan warung makan beroperasi selama Ramadan. Intinya, kata dia, Ramadan harus berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

"Bukan hanya untuk masyarakat muslim tapi bulan suci Ramadan ini menyekatkan juga untuk umat lainnya," kata Pilar. ● pp